

ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI PANTAI PRIGI KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK

Slamet Hariyanto
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Slamethariyanto446@gmail.com

Abstrak

Rendahnya pendapatan nelayan di Prigi salah satunya dipengaruhi oleh faktor kondisi alam. Sehingga proses penangkapan ikan tidak berlangsung sepanjang tahun. Pada periode tertentu nelayan tidak melaut karena angin kencang, gelombang besar dan arus laut yang kuat. Kondisi seperti ini disebut dengan musim paceklik yaitu suatu musim yang dimana nelayan tidak beraktivitas sama sekali. Guna mencukupi kebutuhan hidup nelayan harus mencari pinjaman kepada pedagang atau menjual barang-barang yang dimilikinya. Pinjaman akan dibayar saat musim sudah membaik dan hasil tangkapan ikan melimpah. Konsekuensi yang harus dipenuhi adalah ketika musim ikan nelayan harus menjual hasil tangkapan dengan harga yang telah ditentukan oleh juragan atau pedagang. Dampak dari hubungan kurang baik antara nelayan dengan juragan atau pedagang ini adalah pada saat musim ikan datang nelayan tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan akibatnya, pinjamannya sering kali tidak bisa dilunasi dan menumpuk karena pada musim paceklik berikutnya nelayan meminjam lagi.

Untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat nelayan di pesisir Prigi yang demikian, diperlukan program pemberdayaan yang dapat diwujudkan melalui kemandirian masyarakat nelayan. Program pemberdayaan yang dilakukan harus mampu menjawab semua masalah yang di hadapi masyarakat nelayan di Prigi, selain itu program yang dilakukan harus melibatkan masyarakat sebagai peran utama dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi. Keberhasilan program pemberdayaan bergantung pada *stakeholders* yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan dengan menempatkan masyarakat nelayan sebagai subyek dan objek pembangunan. Dengan adanya pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, baik fisik maupun non fisik.



Kata Kunci: Pemberdayaan Nelayan

Abstract

The low income of fishermen in Prigi beach influenced by natural conditions, so the process of fishing does not take place throughout the year. At certain periods the fishermen not to fish because strong wind, big waves and strong ocean currents. These conditions are referred to the famine that is a season in which the fishermen do not move at all. In order to meet the needs of fishermen borrow merchants or sell its goods. Debt is paid when the season is getting better and abundant fish catches. the term conditions is the fisherman has to sell the catch at a price which determined by the skipper or middlemen. The impact of this bad relationship between fisherman with skipper or middlemen when during the fishing season does not get satisfactory results. And consequently, the debt can't be repaid and being accumulate because the next famine season fishermen would borrow again.

To improve living conditions in the coastal fishing communities in Prigi, needs empowerment program that can be realized through independence fishing communities. Empowerment programs should be able to answer all the problems faced by fishing communities in Prigi, besides that the programs undertaken should involve the community as the main actor in the empowerment of fishing communities in Prigi. The success of the empowerment program depends on stakeholders which involved in the fishing community empowerment by placing the fishing communities as the subject and object of development. With the approach centered on community development can improve the welfare of fishermen, both physical and non-physical.



Key word : Empowerment, Fisherman

A.Latar Belakang

Salah satu sumber daya pembangunan yang sempat ditinggalkan dan dilupakan dalam pembangunan pada era Orde Baru adalah kelautan. Sementara Indonesia, sebagai negara maritim, potensi sumberdaya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil sangatlah besar dan berlimpah untuk dikelola secara optimal sehingga bisa memberi dampak multidimensi yang signifikan bagi negara dan bangsa. Potensi sumberdaya kelautan tidak hanya dari sektor perikanan, tetapi juga pariwisata, perdagangan, perhubungan, dan industri kelautan. Oleh karena itu, pernyataan terhadap realisasi potensi-potensi sumberdaya tersebut sangat merugikan masa depan pembangunan. Bahkan ada kesan

selama ini bahwa kaum nelayan dan berbagai masalah yang dihadapi mereka di kawasan pesisir di potensikan secara marginal sebagai komunitas yang terpisah kan dan ditinggalkan dari pembangunan suatu negara (Kusnadi, 2009).

Indonesia dengan potensi lautnya yang sangat besar, semestinya memberikan harapan, terutama masyarakat nelayan yang mana menjadi masyarakat yang sejahtera. Sehingga dengan kekayaan kelautan yang demikian besar, rasanya tidak percaya jika ternyata belum mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan. Sebagian besar nelayan Indonesia masih hidup dalam garis kemiskinan. Kriteria miskin tersebut diperlihatkan dengan rendahnya pendapatan nelayan, sehingga mereka masih mengalami

kesulitan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar akan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan tingkat pendidikan yang layak.

Ternyata selain masalah dalam pemenuhan kebutuhan hidup nelayan, permasalahan utama dalam pembanguan wilayah pesisir adalah lemahnya keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengembangan kelautan dan wilayah pesisir. Terjadinya masalah tersebut dikarenakan salah satunya adalah lemahnya sistem dan tata cara koordinasi antar *stakeholders* belum didukung dengan adanya sistem hukum yang mengatur kegiatan tersebut. Selain itu, lemahnya kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi proses partisipatif menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008).

Kabupaten Trenggalek, suatu daerah yang terletak di pantai selatan Jawa Timur yang memiliki kegiatan laut dengan garis pantai \pm 96 km. Sebagian pantainya berbentuk teluk yaitu terdiri dari Teluk Panggul di Kecamatan Panggul, Teluk Munjungan di Kecamatan Munjungan dan yang paling besar adalah Teluk Prigi di Kecamatan Watulimo (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2009).

Kabupaten Trenggalek pertumbuhan sektor perikanan dan pariwisata terletak di selatan Kabupaten Trenggalek, yaitu Pantai Prigi (Anonim, 2008). Di Prigi telah dibangun sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan, yaitu: Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi. PPN Prigi dilengkapi dengan fasilitas pokok berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yaitu TPI barat (940 m^2) yang dimanfaatkan untuk pendaratan kapal yang kapasitasnya lebih dari 15 GT dan TPI timur (400 m^2) yang dimanfaatkan untuk pendaratan kapal yang kapasitasnya kurang dari 15 GT.

Rendahnya pendapatan nelayan di Prigi dipengaruhi pula kondisi alam, sehingga proses penangkapan ikan tidak dapat berlangsung sepanjang tahun. Pada saat tertentu nelayan tidak melaut

dikarenakan antara lain: angin kencang, gelombang besar dan arus laut yang kuat. Keadaan seperti ini seringkali disebut dengan musim paceklik yaitu suatu musim dimana nelayan tidak beraktivitas sama sekali. Sementara untuk mencukupi kebutuhan hidup nelayan maka mereka pinjam ke pedagang atau menjual barang-barang yang dimilikinya. Pinjaman akan dibayar saat musim sudah membaik dan hasil tangkapan ikan melimpah. Dengan perjanjian nelayan harus menjual hasil tangkapan dengan harga yang telah ditentukan oleh juragan atau pedagang. Dampak dari hubungan buruk ini antara nelayan dengan juragan atau tengkulak adalah pada saat musim ikan datang nelayan tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan akibatnya, utang tidak bisa dilunasi dan menumpuk karena pada musim paceklik berikutnya nelayan mengutang lagi.

Pembangunan kawasan di Prigi yang dilakukan oleh pemerintah pusat pada tahun 2001, sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan fungsi dan pelayanan perikanan. Akan tetapi belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional karena cenderung berorientasi pada target secara ekonomis. Yakni mengejar target pendapatan daerah dari sektor kelautan dan perikanan. Realita ini tampak dari jenis kegiatannya yang lebih memihak pada kaum kapitalis atau pengusaha dibidang kelautan dan perikanan, seperti pembangunan pelabuhan, tempat pelelangan ikan dan fasilitas keperluan operasi penangkapan ikan.

Sementara pembangunan kawasan di Prigi hanya menekankan pada aspek fisik saja, dan belum banyak memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kesejahteraan nelayan yang ada disekitar Prigi. Hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan tempat pelelangan ikan.

Menurut Siswanto (2008) mengatakan bahwa bagi pemerintah, ikan merupakan sumber daya potensial untuk pembiayaan pembangunan. Pemerintah lokal bisa memperolehnya melalui pemungutan pajak atau redistribusi atas transaksi

perdagangan ikan di TPI. Dalam kenyataannya di-TPI terdapat banyak kelompok kepentingan ketika ikan datang di tempat pelelangan. TPI selalu ramai dengan kegiatan transaksi perdagangan ikan dengan corak kehidupan ekonomi politik dan sosial yang unik. TPI juga melaksanakan fungsi proteksi terhadap pelaku-pelaku di dalamnya. TPI mendorong mekanisme pasar yang adil dengan penentuan batas atas dan batas bawah harga ikan. Tujuannya untuk meningkatnya kesejahteraan nelayan.

Dalam rangka meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat nelayan di pesisir Prigi di perlukan program pemberdayaan yang dapat diwujudkan melalui kemandirian masyarakat nelayan. Program pemberdayaan yang dilakukan harus mampu menyelesaikan semua masalah yang di hadapi masyarakat nelayan di Pantai Prigi, selain itu program yang dilakukan harus melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi.

Keberhasilan program pemberdayaan bergantung pada *stakeholders* yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan dengan menempatkan masyarakat nelayan sebagai subyek dan objek pembangunan. Dengan adanya pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, baik fisik maupun non fisik.

Beberapa ahli mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan (Suharto,1997:210-224): a).Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife,1995). b).Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain

yang menjadi perhatiannya (Parson,*et.al.*,1994).c).Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987).d).Pemberdayaan adalah suatu cara dengan nama rakyat,organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984).

Peran Tiga Aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat

Aktor	Peran dalam Pemberdayaan	Bentuk Output Peran	Fasilitasi
Pemerintah	Formulasi dan penetapan <i>policy</i> , implementasi monitoring dan evaluasi serta mediasi.	Kebijakan: Politik, Umum, Khusus Departemen Sektorial Penganggaran, Juknis dan Juklak, penetapan indikator keberhasilan peraturan hukum, penyelesaian sengketa.	Dana, jaminan, alat, teknologi, <i>network</i> , sistem manajemen informasi, edukasi.
Swasta	Kontribusi pada formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi.	Konsultasi dan rekomendasi kebijakan, tindakan dan langkah <i>policy action</i> implementasi, donator, <i>private investment</i> pemeliharaan.	Dana, alat, teknologi, tenaga ahli dan sangat terampil
Masyarakat	Partisipasi dalam formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi.	Saran, input, kritik, rekomendasi, keberatan, dukungan dalam formulasi kebijakan. <i>Policy action</i> , dana swadaya menjadi objek partisipan, pelaku utama subjek, menghidupkan fungsi kontrol sosial.	Tenaga terdidik, tenaga terlatih, setengah terlatih dan setengah terlatih.

Sumber: Sulisliyani (2007:97)

Menurut Kusnadi (2006), mengatakan bahwa ada beberapa indikator kualitatif yang menandai suatu masyarakat nelayan memiliki keberdayaan, yaitu:

- a.Tercapainya kesejahteraan sosial-ekonomi: individu, rumah tangga dan masyarakat yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut ini: a)Kemandirian ekonomi berkembang dan orientasi kewirausahaan meningkat.b).Nilai tabungan dan investasi bertambah. c).Kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, optimal, dan berkelanjutan. d)Kondisi

kualitas sumber daya manusia (SDM) berkembang baik.

b.Kelembagaan ekonomi berfungsi optimal dan aktivitas ekonomi stabil-kontinuitas.

c.Kelembagaan sosial berfungsi dengan baik sebagai instrument pembangunan lokal.

d.Berkembangnya kemampuan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi: informasi, kapital pasar, dan teknologi.

c.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan di kawasan pesisir dan tumbuhnya kesadaran kritis warga terhadap persoalan-persoalan pembangunan yang ada di kawasan pesisir.

d.Kawasan pesisir menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional yang dinamis, serta memiliki daya tarik investasi.

B.Rumusan masalah

- Bagaimana peran *stakeholders* dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi?
- Bagaimana bentuk program pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi ?
- Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Prigi?
- Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis peran *stakeholders* dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi, untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis bentuk program pemberdayaan masyarakat nelayan Prigi yang ada di TPI, untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan Prigi, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sukmadinata, (2006:72) Penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1.Peran *stakeholders* dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi, meliputi:
a.Pemerintah meliputi; Tempat Pelelangan ikan (TPI),Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)Prigi.,Pemerintah Desa Tasikmadu.
b.Swasta diwakili pedagang. c.Masyarakat meliputi;Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),Kelompok nelayan.

2.Bentuk pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi meliputi; Teknologi, Program dari pemerintah, Pemberdayaan wanita nelayan

3.Kesejahteraan masyarakat nelayan, meliputi; Tingkat Kesehatan, Tingkat Pendidikan, Perumahan, Pengeluaran konsumsi rumah tangga

4.Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi, meliputi; Faktor internal dan Faktor eksternal

3. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan sebuah penelitian.

Berdasarkan lokasi penelitian ini, peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang telah ditetapkan di Kabupaten Trenggalek.

Situs penelitian adalah tempat dimana sebenarnya peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti untuk dapat memperoleh data yang valid dan akurat. Disini yang menjadi situs penelitian adalah:

1.Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Trenggalek.

2.Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Prigi.

3.Pelabuhan Perikanan Nusantara

(PPN) Prigi

4.Desas Tasikmadu

4.Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah: 1).Dinas Kelautan dan Perikanan Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan, Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 2).UPTD TPI meliputi: Kepala UPTD TPI dan Pelaksana Tata Usaha. 3).Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi meliputi:Bagian Tata Usaha dan Bagian Pengembangan. 4) Pemerintah Desa Tasikmadu.

5.Teknik Pengumpulan Data

a.Wawancara.b.Pengamatan.c.Studi

Kepustakaan.d.Dokumentasi

6.Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif, dengan analisa model interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Hubberman (dalam Moleong:307), yang terdiri dari 3 komponen analisis yaitu:

a.Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemberian fokus, penyederhanaan dan transformasi data mentah terdapat di lapangan.Hal ini bertujuan untuk mempertajam,menggolongkan,menyortir dan mengorganisasikan data.

b.Penyediaan data, yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Bentuk paling umum yang digunakan berupa teks uraian.

c.Penarikan kesimpulan/verifikasi , merupakan akhir kegiatan analisis berupa penarikan kesimpulan dengan cara meninjau ulang data-data yang diperoleh dilapangan agar data tersebut valid.

E.HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan maka dapat dikemukakan sebagai berikut:

1.Peran *Stakeholders* dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Prigi

No	Stakeholders	Realita Lapangan
1.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek	1. Sebagai penanggungjawab program. 2. Kebijakan yang dikeluarkan dinas dalam pemberdayaan masyarakat masih bersifat terpusat.
2.	UPTD TPI	1. TPI tidak berfungsi sebagaimana tujuan awal didirikannya TPI. 2. TPI gagal mengambil peranan dalam penentuan harga ikan. 3. Tidak ada proses partisipatif dalam penentuan harga ikan yang melibatkan <i>stakeholders</i> . 4. Tidak ada kebijakan dari Dinas Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan TPI.
3.	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi	1. Sebagai penyedia sarana dan prasarana kegiatan perikanan di Prigi. 2. Penggunaan fasilitas perikanan belum di gunakan secara optimal. 3. Fasilitas yang disediakan masih dikelola oleh swasta
4.	Pemerintah Desa Tasikmadu	1. Membantu dinas dalam mengidentifikasi potensi dan masalah tentang nelayan Prigi. 2. Peran pemerintah desa sangat kecil, bahkan pemerintah desa hanya sebagai formalitas saja.
5.	Pedagang ikan	1. Pedagang dominan dalam penentuan harga ikan. 2. Pedagang mendominasi nelayan dengan menciptakan sistem ketekitan nelayan dengan pedagang.
6.	Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM)	1. Membantu dinas dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi 2. Kinerja LSM belum berfungsi secara optimal, LSM bekerja sesuai dengan instruksi dari dinas. 3. Masa kerja LSM terbatas.
7.	Kelompok Masyarakat	1. Tidak semua nelayan tergabung dalam kelompok. 2. Kelompok merupakan bentukan dari dinas bukan inisiatif masyarakat.

Sumber: Data primer yang diolah

Matrik di atas menunjukkan masing-masing peran *stakeholders* mempunyai peran yang berbeda, yang mana berdasarkan temuan di lapangan peran pemerintah sangat dominan dan belum ada kesinergisan hubungan dengan swasta. Swasta dalam melakukan peranannya bersifat parasitisme yang cenderung merugikan nelayan, dan dengan keadaan yang seperti itu mempersempit ruang gerak masyarakat.

a. Pemerintah

Dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi, pemerintah yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan tersebut mempunyai peran berbeda-beda, semua berperan sesuai dengan kapasitas masing-masing lembaga. *Pertama*, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek merupakan pelaksana desentralisasi dari Departemen Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kelautan dan perikanan merupakan penanggungjawab semua program yang telah digulirkan pemerintah kepada nelayan pada tingkat kabupaten.Sebagai pelaksana teknis Departemen Kelautan dan Perikanan di tingkat kabupaten, dinas sebagai penyelenggara program mempunyai peran sebagai penentu kebijakan dalam bidang

perikanan termasuk dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. Akan tetapi dalam penentuan kebijakan dinas cenderung otoriter, dinas terlalu dominan dalam menentukan kebijakan tanpa melibatkan peran serta masyarakat.

Kedua, yang mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat nelayan adalah UPTD TPI. Maksud dan tujuan pendirian TPI adalah mengadakan pemberdayaan masyarakat nelayan dan mensejahterakan kehidupan nelayan. Wujud dari pemberdayaan masyarakat nelayan dan mensejahterakan nelayan TPI mempunyai strategi untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut, yaitu dengan menerapkan sistem lelang.

Ketiga, aktor yang terlibat lainnya adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi. Peran PPN Prigi dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi adalah sebagai penyedia fasilitas sarana dan prasarana kegiatan dalam bidang perikanan. Sarana dan Prasaran yang ada di Prigi merupakan fasilitas dari PPN Prigi, fasilitas yang tersedia meliputi: gedung TPI, pabrik ikan, *cold storage*, pabrik tepung dan SPDN (*Solar Packed Dealer Nelayan*), meskipun dalam pelaksanaannya tersedianya fasilitas tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan nelayan secara optimal dan nelayan masih tetap bergantung pada pihak lain guna memenuhi kebutuhannya.

Keempat, Pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi mempunyai peran membantu dinas dalam mengidentifikasi nelayan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat nelayan. Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat ini terkesan formalitas saja, setelah tugas yang dilakukan oleh pemerintah desa, pemerintah desa sudah tidak dilibatkan lagi dalam pemberdayaan sehingga peran dari pemerintah desa semakin kecil bahkan tidak mempunyai kewajiban terhadap kehidupan masyarakat nelayan yang ada di Prigi, seakan-akan dinas mempunyai peran yang dalam dominan.

Berdasarkan data lapangan bahwa peran pemerintah pusat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi sangat dominan, peran dominan pemerintah pusat menyebabkan gagalnya sebuah pemberdayaan masyarakat. Program pembangunan yang terjadi sekarang ini cenderung bersifat *top-down*, dengan berjalannya sifat itu memberi ruang gerak pemerintah daerah kurang berperan karena kebijakan pembangunan di bidang perikanan ditentukan oleh pusat dan peran masyarakat sangat kecil dan menyebabkan kegagalan sebuah program.

Selama ini kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah belum menyentuh masyarakat, akan tetapi pembangunan hanya dinikmati oleh sebagian orang saja, masyarakat yang lain tetap dalam keadaan miskin. Melihat kondisi seperti ini perlu diadakan perubahan sistem, yang semula cenderung pembangunan dilakukan *top-down*, bergeser menjadi *bottom-up*. Harapan dengan pergeseran pola ini, untuk meminimalkan peran negara terhadap pemberdayaan, dan memberikan keleluasaan masyarakat untuk mengembangkan diri. Pemberian keleluasaan disini bukan berarti negara tidak berperan, akan tetapi peran negara diharapkan menjadi:

- 1).Pemerintah harus memahami aspirasi rakyat dan harus peka terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat.
- 2).Pemerintah harus membangun partisipasi rakyat. Artinya, berilah sebanyak-banyaknya kepercayaan pada rakyat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Aparat pemerintah membantu memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri.
- 3).Untuk itu maka pemerintah harus menyiapkan masyarakat dengan sebaiknya, baik pengetahuannya maupun cara bekerjanya, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat efektif. Ini merupakan bagian dari upaya pendidikan sosial untuk memungkinkan rakyat membangun dengan kemandirian.
- 4).Pemerintah harus membuka dialog dengan masyarakat. Keterbukaan dan konsultasi ini sangat perlu untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat, dan agar aparat dapat segera membantu jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh rakyat. 5).Pemerintah harus membuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak dapat diperolehnya sendiri.6).Pemerintah harus menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat yang lemah.

Mengenai bergesernya peran pemerintah dalam pemberdayaan ini, pembangunan dapat berjalan baik, sehingga kesejahteraan masyarakat terwujud.

b. Swasta

Pedagang dalam konteks pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi merupakan katagori pihak swasta. Dalam pemberdayaan masyarakat nelayan pedagang mempunyai peranan yang sangat penting seperti yang diungkapkan Acheson (1981:282) yang mengatakan bahwa dalam banyak masyarakat nelayan diberbagai belahan dunia manapun, nelayan dan pedagang terikat oleh hubungan kerjasama yang kuat untuk kepentingan jangka panjang. Menurut Acheson, kerjasama yang dimaksud oleh nelayan untuk membantu mengurangi ketidak pastian dalam pemasaran ikan dan memenuhi kebutuhan usaha. Pernyataan Acheson diperkuat oleh pernyataan Firth (1946:1985), mengatakan bahwa tugas utama pedagang adalah menyelenggarakan kegiatan pasar secara terus-menerus agar ikan tetap tersedia untuk konsumen dan menyelamatkan harga ikan ketika hasil tangkapan melimpah atau sedikit.

Pedagang menjadi tumpuhan pemenuhan kebutuhan modal usaha bagi nelayan, karena syarat-syarat teknis yang dikenakan sangat mudah. Kemudahan itu antara lain: 1). Prosedur peminjaman yang tidak formal-birokratis. 2).Tidak menggunakan anggaran. 3).Jangka pengembalian relatif lama.4).Tidak ada angsuran rutin dari pinjaman tersebut.5).Tidak ada bunga pinjaman yang belaku tetap seperti pada lembaga keuangan formal, dan.

6).Peminjaman dapat dilakukan dimana saja, kapan saja.

Peranan sosial ekonomi pedagang tersebut mengantarkan pedagang berkedudukan strategis dalam aktivitas ekonomi perikanan masyarakat nelayan Prigi. Sistem gantungan merupakan kelembagaan ekonomi lokal yang berakar kuat dalam kehidupan sosial ekonomi Prigi.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya terdapat beberapa hal yang dapat dikemukakan tentang eksistensi pedagang. *Pertama*, pedagang menjadi tumpuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari para nelayan, dengan prosedur yang mudah untuk dipenuhi. *Kedua*, pedagang berperan penting dalam pemasaran hasil tangkapan nelayan. *Ketiga*, pedagang dan sistem gantungan merupakan bagian integral dari sistem sosial, budaya dan ekonomi masyarakat nelayan Prigi. *Keempat*, atas dasar ketiga hal diatas, pedagang dan sistem gantungan merupakan modal sosial dan menjadi kekuatan internal nelayan yang berpotensi didayagunakan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat.

Selama ini, eksistensi pedagang dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat nelayan diabaikan karena:

1).Masih kuatnya pandangan negatif terhadap pedagang yang dianggap sebagai rentenir yang membebani nelayan, sehingga jika dilibatkan dikhawatirkan akan memanfaatkan program-program pemberdayaan tersebut untuk kepentingannya sendiri. 2). Pedagang sudah dianggap memiliki kemampuan ekonomi yang lebih, sehingga jika dilibatkan dalam program pemberdayaan justru akan memperkaya pedagang dan menyalahi substansi program pemberdayaan yang lebih di tujukan kepada nelayan-nelayan yang kurang mampu secara ekonomi

Lembaga-lembaga keuangan atau pendanaan yang dibangun melalui program-program pemberdayaan pesisir seperti koperasi LEPP-M3, sekarang sudah bisa di akses oleh siapapun yang bergerak untuk mengembangkan ekonomi pesisir, termasuk

pedagang. Karena itu keterlibatan pedagang di berbagai daerah, dalam program-program pemberdayaan masyarakat, maka masyarakat nelayan dapat mengambil tempat sebagai subjek dan objek pemberdayaan.

c. Masyarakat

Terdapat tiga alasan utama mengapa masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting dalam pembangunan (Conyers, 1994h.154), yaitu *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh suatu informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sifat masyarakat dalam ketidakhadirannya, program pembangunan dan proyek-proyek akan gagal. *Kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek jika mereka merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut. *Ketiga*, akan mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri.

Dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi peran masyarakat di wakili oleh LSM dan kelompok masyarakat. Berdasarkan fakta lapangan masyarakat mempunyai peran yang sangat kecil bahkan keterlibatan mereka hanya sebagai formalitas saja. *Pertama*, menyangkut peran LSM dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi yang mana LSM merupakan wakil dari masyarakat nelayan tidak dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan program pemberdayaan. LSM hanya sebagai pelaksana program dari Dinas Kelautan dan Perikanan, peran yang dilaksanakan LSM merupakan bentukan dari dinas. Dengan bentukan peran dari dinas peran LSM sangat sempit sehingga mempersulit ruang gerak LSM dalam proses pemberdayaan.

Kedua, kelompok masyarakat. Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial. Pembentukan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat nelayan mempunyai tujuan yaitu untuk

mengkoordinir masyarakat nelayan. Namun dalam prakteknya tidak semua nelayan tergabung dalam kelompok hal ini dikarenakan kelompok yang terbentuk bukan karena inisiatif masyarakat sendiri, kelompok terbentuk akibat dari sebuah program yang menuntut terbentuknya sebuah kelompok. Dalam pemberdayaan masyarakat nelayan Prigi, keterlibatan masyarakat nelayan hanya sebagai penikmat program, masyarakat tidak diajak dalam proses perencanaan, sehingga untuk menjamin keberlangsungan program sangat rawan.

Berdasarkan data lapangan bahwa peran masyarakat tidak seperti yang diharapkan. Keadaan tersebut memang ironis sekali bahwa pemerintah masih menempatkan masyarakat sebagai objek. Masyarakat hanya digunakan sebagai pemanfaat program. Paradigma seperti itu seharusnya di perbarui dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Peran serta masyarakat akan mempengaruhi tujuan pembangunan. Seharusnya keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas pada pemanfaat program, tetapi lebih dari pemanfaat program yaitu lebih pada proses persiapan, perencanaan bahkan monitoring dan evaluasi melibatkan peran masyarakat. Dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan maka tujuan pemberdayaan dapat memenuhi harapan.

1. Bentuk - Bentuk Pemberdayaan Masyarakat nelayan di Prigi

Banyak program pemberdayaan yang notabene sebagai program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat (*bottom up*), tetapi kenyataannya masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-program tersebut sehingga tidak aneh banyak program yang hanya seumur masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat.

Begitu juga dengan program pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi. Pemerintah telah menggulirkan beberapa program guna meningkatkan masyarakat nelayan, akan tetapi program tersebut belum

berjalan optimal. Program yang pernah digulirkan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi adalah Bantuan Teknologi Tepat Guna, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) dan Pemberdayaan Perempuan Pesisir.

Berdasarkan data lapangan terhadap program pemberdayaan dalam rangka pengentasan kemiskinan masyarakat nelayan di pesisir Prigi, yakni Bantuan Teknologi Tepat Guna, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) dan Pemberdayaan Perempuan Pesisir, sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya, dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Program Pemberdayaan Guna Mengentaskan Kemiskinan Nelayan Pesisir Prigi

No.	Karakteristik Pemberdayaan	Realita Lapangan		
		Bantuan Teknologi Tepat Guna	PNPM M-KP	Pemberdayaan Perempuan Pesisir
1.	Prakarsa	Dari pemerintah	Dari pemerintah	Dari pemerintah
2.	Masalah yang dihadapi	Belum optimal dalam menjawab permasalahan yang ada	Belum optimal dalam menjawab permasalahan yang ada	Belum optimal dalam menjawab permasalahan yang ada
3.	Perencanaan program	Kurang partisipatif akomodatif terhadap aspirasi dan partisipasi komunitas	Kurang partisipatif akomodatif terhadap aspirasi dan partisipasi komunitas	Kurang partisipatif akomodatif terhadap aspirasi dan partisipasi komunitas
4.	Potensi Lokal	Belum dimanfaatkan dalam program	Belum dimanfaatkan dalam program	Belum dimanfaatkan dalam program
5.	Orentasi Program	Penekanan pada hasil berupa perkembangan bantuan mesin	Penekanan pada hasil berupa akumulasi modal bergulir yang diwujudkan dalam bentuk barang	Penekanan pada kemampuan manajemen nelayan dalam pengelolaan dana pinjaman

6.	Jenis Kelembagaan	Dibentuk dari atas	Dibentuk dari atas	Dibentuk dari atas
7.	Pola Usaha/Kegiatan	Kemitraan diatur langsung oleh penyelenggara program	Kemitraan diatur langsung oleh penyelenggara program	Kemitraan diatur langsung oleh penyelenggara program
8.	Kelembagaan	Bersifat formal yang terkesan kaku	Bersifat formal yang terkesan kaku	Bersifat informal dan lemah sehingga kontinuitas program rawan
9.	Pengorganisasian Program	Lemah	Lemah	Lemah
10.	Feed Back Program	Pemanfaatan tidak disertakan	Pemanfaatan tidak disertakan	Pemanfaatan tidak disertakan
11.	Keperimpinan	Kurang Kuat	Kurang Kuat	Kurang kuat
12.	Evaluasi	Evaluasi diselenggarakan oleh evaluasi Program	Evaluasi diselenggarakan oleh evaluasi Program	Evaluasi diselenggarakan oleh evaluasi Program

Sumber: Data primer yang di olah

Implementasi program pemberdayaan masyarakat nelayan dalam pengentasan kemiskinan masyarakat nelayan di Prigi, antara lain sebagai berikut: *pertama*, dari segi prakarsa ketiga program merupakan program dari pihak penyelenggara, dalam hal ini adalah pemerintah (Departemen Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek). Sehingga ketiga program tersebut bersifat dari atas ke bawah (*top-down*). *Kedua*, karena sifat ketiga program bersifat dari atas ke bawah (*top-down*), program yang digulirkan pemerintah belum optimal menjawab permasalahan dan memenuhi kebutuhan yang riil dari masyarakat nelayan Prigi.

Bantuan Teknologi Tepat Guna, PNPM Mandiri-Kelautan dan Pemberdayaan Perempuan Pesisir merupakan program skala nasional, jadi kurang mengakomodasi sumber-sumber dan potensi yang ada di Prigi. *Ketiga*, kurang akomodatifnya program tersebut terhadap sumber-sumber dan potensi yang ada di Prigi karena proses desain dan teknologi yang digunakan, dilakukan serta ditentukan secara *top-down* oleh penyelenggara, meskipun secara teknis implementasi dilapangan tetap berupaya

mendengarkan aspirasi dari sasaran program tersebut. *Keempat*, tampak dalam pelaksanaan ketiga program tersebut lebih mengutamakan sumberdaya eksternal dari pada internal. Wujud kongkrit dari dari ketiga program tersebut sama-sama lebih berkonsentrasi menyalurkan dan mengembangkan bantuan sarana perikanan dan modal bergulir daripada mendayagunakan SDM, serta mengembangkan potensi yang ada di daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan. *Kelima*, ketiga program tersebut lebih berorientasi pada hasil daripada proses. Hal ini tampak dari indikator keberhasilan program yang lebih menekankan pada nilai akumulasi modal (jumlah barang kebutuhan melaut seperti mesin, jenset, alat tangkap dan lain-lain) yang telah diberikan daripada perubahan perilaku nelayan. *Keenam*, pada kenyataannya organisasi pendukung dibentuk secara *button-up*, tetapi masih diberlakukan sesuai keinginan penyelenggara program. Hal itu dipahami karena sistem pemberdayaan yang dibangun, memaksa kelompok nelayan dan koperasi seragam. *Ketujuh*, pada konteks ini organisasi pendukung tidak terbentuk, tumbuh dan berkembang secara bertahap dari bawah. Akan tetapi koperasi yang telah ada sebelumnya berupaya membentuk kelompok nelayan sebagai binaan yang sekaligus merupakan anggota. *Kedelapan*, secara kelembagaan keberlanjutan program dan kegiatan sangat rawan, hal ini karena mengingat para kader belum disiapkan secara matang melalui pembinaan proporsional, berkesinambungan serta berdasarkan belajar dan kegiatan dilapangan. *Kesembilan*, pengorganisasian program dan kegiatan tampak lemah, karena hanya diorganisir secara struktural sesuai keinginan birokrasi, sebaliknya secara fungsional tidak melibatkan tim yang diorganisir. *Kesepuluh*, timbal balik dalam pengelolaan program kurang nampak pada perbaikan dan penyempurnaan selanjutnya. Hal ini disebabkan penerima pemanfaat program tidak disertakan secara optimal pada

evaluasi program. Evaluasi program dilakukan oleh penyelenggara, pendamping dan konsultan. *Kesebelas*, kepemimpinan dalam program tampak kurang kuat. Kepemimpinan yang ada tidak berupaya menerapkan sistem partisipatif dan demokratis. *Keduabelas*, analisis yang berkaitan dengan pelaksanaan program belum dilakukan secara optimal. Terutama pada tahap persiapan dalam rangka menentukan kebijakan dan strategi yang akan ditempuh serta evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan program.

Program yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan di Prigi belum optimal dilakukan. Karena program yang telah digulirkan pemerintah tidak memenuhi persyaratan dalam sebuah pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Iffe bertujuan meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah dan tidak beruntung. Maksudnya dalam sebuah pemberdayaan masyarakat, masyarakat dalam tingkat bawah memberikan rangsangan untuk mendewasakan diri, membentuk kemandirian, melalui pertahapan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Sedangkan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah guna mengentaskan kemiskinan di Prigi masih jauh dari harapan. Pemerintah masih menggunakan pendekatan *top-down*, padahal pendekatan *top-down* dalam pemberdayaan masyarakat sudah banyak mendapat kritikan, karena pendekatan tersebut memiliki banyak kelemahan. Kelemahan dari pendekatan *top-down* adalah bahwa pendekatan tersebut mematikan inisiatif dan kreatifitas masyarakat. Penyeragaman kegiatan yang digulirkan oleh pemerintah juga telah menimbulkan banyak masalah. Cara pandang dari pendekatan ini cenderung kaku yang telah mengabaikan kekhususan wilayah dan masyarakat, karena pendekatan ini cenderung mengabaikan sosial budaya, perbedaan potensi wilayah, kemampuan sumberdaya manusia sehingga program pemberdayaan

sampai dengan bentuk kegiatan dibuat seragam untuk semua wilayah.

3.Kesejahteraan Masyarakat

Berbicara mengenai kesejahteraan merupakan sesuatu yang tidak bisa diukur, hal ini dikarenakan setiap individu mempunyai ukuran masing-masing. Kesejahteraan berkaitan dengan rasa yang sulit untuk di definisikan. Berdasarkan data lapangan kesejahteraan masyarakat nelayan di Prigi dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu dari tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat perumahan dan tingkat kesehatan. Tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan akan berdasarkan data lapangan disajikan dalam tabel berikut:

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Prigi

Indikator Kesejahteraan	Realita Lapangan
Pendapatan	1.Pendapatan masyarakat nelayan masih mengandalkan satu bidang saja yaitu bidang perikanan. 2.Pendapatan nelayan meningkat,akan tetapi peningkatan masih relatif kecil
Pendidikan	1.Kepedulian masyarakat terhadap pendidikan masih relatif kecil. 2.Pendidikan nelayan masih di dominasi oleh tingkat pendidikan sekolah dasar (SD)
Perumahan	1.Adanya peningkatan pembangunan perumahan nelayan. 2.Dalam pembangunan perumahan nelayan tidak hanya mengandalkan kelautan akan tetapi sebagian istri nelayan dalam rangka membantu perekonomian keluarga mereka bekerja sebagai TKW atau berjualan kecil-kecilan.
Kesehatan	1.Kesadaran masyarakat nelayan terhadap kesehatan meningkat. 2.Terdapatnya fasilitas kesehatan meskipun belum optimal. 3.Tersedianya tenaga medis guna membantu kesehatan nelayan.

Sumber: Data primer yang di olah

Berdasarkan tabel di atas telah menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat nelayan di Prigi mengalami peningkatan, akan tetapi dengan peningkatan

seperti data di atas, masyarakat nelayan belum bisa dikatakan sejahtera. Selama ini yang menjadi tolak ukur adalah hanya dari segi pendapatan saja, akan tetapi kesejahteraan mencakup segala sektor. Keberdayaan masyarakat dalam segala sektor juga belum dapat di gunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan.

Mengacu pada pendapat Susanto (1984:49) mengatakan bahwa proses pembangunan yang dilakukan pada suatu negara akan berdampak pada terjadinya perubahan sosial masyarakat.Perubahan-perubahan kehidupan sosial kemasyarakatan ini akan menumbuhkan kebutuhan-kebutuhan sosial yang semakin kompleks, dan karena menuntut pemenuhan yang tidak sederhana.

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sebuah pembangunan harus ada perubahan menuju kesejahteraan dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat dalam segala bidang. Begitu halnya dengan pembangunan di bidang perikanan, harus terjadi perubahan pada kehidupan masyarakat nelayan. Dapat di ketahui bahwa selama ini pembangunan dalam bidang kelautan dan perikanan belum mendapat perhatian yang sangat serius, hal ini terlihat dari kondisi kehidupan nelayan dan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan yang masih relatif sederhana.

Hal di atas juga masih di alami oleh masyarakat nelayan di Prigi, jika dilihat dari segi pendapatan memang pendapatan nelayan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun akan tetapi peningkatan yang terjadi bukan peningkatan yang sangat signifikan, peningkatan tersebut masih tergolong sangat minim sekali. Dengan pendapatan yang minim dapat mempengaruhi sektor yang lainnya, misalkan saja bidang pendidikan, perumahan bahkan kesehatan.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, bahwa tingkat pendidikan nelayan di Prigi masih di dominasi oleh lulusan SD dan SMP, serta tingkat kesadaran masyarakat akan pendidikan sangat kurang. Tingkat pendidikan yang rendah akan

mempengaruhi produktivitas mereka. Dari segi perumahan, sudah terjadi pembangunan dalam bidang perumahan. Perumahan masyarakat nelayan di Prigi sudah membaik, pembangunan rumah nelayan ini bukan semata-mata hasil melaut saja, akan tetapi banyak diantara nelayan Prigi yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW), negara yang menjadi tujuan biasanya adalah Hongkong, Malaysia, Taiwan, Arab serta negara lain yang bisa menghasilkan uang banyak. Menjadi TKW yang dilakukan oleh istri atau kerabat nelayan ini dilakukan untuk membantu perekonomian keluarga nelayan, sehingga mereka bisa membangun perumahan yang layak.

Dari kesehatan, berdasarkan data lapangan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran akan kesehatan sudah lumayan membaik, dibandingkan dari sebelumnya, kesehatan masyarakat nelayan membaik karena di tunjang oleh sarana dan tenaga medis meskipun sarana yang disediakan masih sederhana.

Dari hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa kesejahteraan masyarakat nelayan masih relatif sama sebelum dan sesudah pemberdayaan hal ini dikarenakan peningkatan yang dialami oleh masyarakat nelayan di Prigi masih relatif kecil, yang menyebabkan pemberdayaan sulit untuk diwujudkan.

Program-program yang telah digulirkan oleh pemerintah belum menjadikan masyarakat nelayan di Prigi sejahtera, hal ini di indikasikan bahwa masih belum terpenuhinya kebutuhan yang menyebabkan masih ketergantungan pada sektor lain yaitu menjadi TKW guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi di anggap belum optimal dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan, karena meskipun ada program pemberdayaan masyarakat belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengacu pada pendapat Suharto sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh

sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2005 : 59-60). Dalam kenyataannya nelayan di Prigi belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, mereka masih bergantung pada pedagang, dalam memenuhi kebutuhan mereka.

4. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Pemberdayaan Masyarakat

Faktor penghambat dan faktor pendukung merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan. Berdasarkan data lapangan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan Prigi terdapat faktor penghambat internal dan penghambat eksternal. Selain faktor-faktor tersebut terdapat faktor pendukung pemberdayaan, baik internal maupun eksternal.

a. Faktor-Faktor Penghambat Internal

Pertama, kualitas SDM. Dari sisi keahlian yang menjadi permasalahan utama adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah karena tingkat pendidikan mereka yang pada umumnya adalah SD atau tamat SMP. Tingkat pendidikan yang rendah disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, kesadaran pendidikan yang kurang dan sulitnya lulusan sekolah dasar mengakses sekolah-sekolah menengah lanjutan karena hambatan geografis. Tingkat pendidikan yang rendah mempengaruhi etos kerja nelayan. Visi dan misi bisnis ke depan serta wawasan yang luas tentang bagaimana mengelola potensi sumberdaya ekonomi pesisir secara optimal dan berkelanjutan.

Kedua, kapasitas pegawai dinas. Dengan mengingat sedikitnya orang dalam Dinas Kelautan dan Perikanan yang menyebabkan memerlukan bantuan pihak ketiga dalam pembantu penyelesaian tugas. Dengan pemberian tugas ini dikawatirkan pihak yang di beri tugas tidak bertanggung

jawab yang menyebabkan program pemberdayaan berjalan tidak sebagaimana mestinya. Keadaan seperti ini juga menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi.

Ketiga, anggaran. Kekurangan dana merupakan alasan klasik suatu pemberdayaan tidak dapat berjalan dengan baik serta belum memenuhi kebutuhan nelayan. Berdasarkan fakta lapangan dana yang dianggarkan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi belum dapat mengatasi kemiskinan nelayan. Hal ini disinyalir bahwa setiap program pemberdayaan masyarakat nelayan yang menerima bantuan adalah sebagian orang tertentu, sehingga program yang telah di gulirkan hanya dinikmati oleh sebagian nelayan. Nelayan yang belum mendapat bantuan tetap pada posisi tak berdaya.

Anggaran merupakan salah satu pendorong pemberdayaan dapat berjalan dengan baik. Kekurangan dana akan menjadi penghambat dalam pemberdayaan karena bantuan yang diberikan tidak dapat menjangkau semua nelayan, dengan keadaan seperti itu kemiskinan tetap saja berlangsung, seharusnya dana yang di anggarkan bisa dinikmati semua nelayan.

b. Faktor Penghambat Eksternal

Pertama, Tengkulak dan rentenir/pedagang merupakan elemen yang memiliki pengaruh cukup besar dalam mengganggu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Tidak dapat dipungkiri, kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan tradisional masih terikat secara moral dengan tengkulak dan rentenir. Tengkulak dan rentenir sebagai pemilik modal telah memberikan keleluasaan dan kebebasan bagi nelayan dalam pengelolaan sumberdaya ikan, walaupun keleluasaan dan kebebasan itu sekaligus menjadi pekekang bagi nelayan yang sulit untuk dilepaskan. Sudah menjadi aturan yang tidak tertulis, bahwasannya hubungan antara tengkulak dan rentenir ini sebagai suatu ikatan yang saling membutuhkan. Segala kebutuhan nelayan dalam usaha perikanan yang dilakukannya dipenuhi oleh tengkulak dan rentenir sebagai

pemilik modal atau sebagai penguasa usaha lokal.

Sistem ini selain menjerat nelayan tradisional, juga memberikan kekuatan pandangan bagi nelayan bahwa menerima apa yang dibutuhkan dari tengkulak dan rentenir lebih mudah dan lebih leluasa dibandingkan dengan menerima bantuan bergulir dari program pemberdayaan.

Kedua, kontrak kerja. Dalam pemberdayaan masyarakat nelayan nelayan di Prigi pemerintah bekerjasama dengan LSM. Akan tetapi peran LSM tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena berkaitan dengan kontrak kerja yang dilakukan pemerintah dan LSM. Kontak kerja dengan LSM sangat terbatas dan hubungan kerjasama itu hanya dilakukan ketika program berlangsung, ketika program berakhir maka kerjasama juga akan berakhir. Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Proses pemberdayaan harus mampu mewujudkan masyarakat dalam kemandirian dan keberdayaan. Wujud dari proses pemberdayaan tersebut dapat dilakukan dengan proses pendampingan secara terus menerus dan dilakukan sampai masyarakat benar-benar mandiri.

c. Faktor Pendukung Internal

Pertama, modal manusia (*Human Capital*). Penduduk yang besar akan menjadi aset pembangunan jika berkualitas, dan sebaliknya penduduk yang besar tersebut akan menjadi beban pembangunan bila produktivitasnya rendah. Harus diakui bahwa masyarakat nelayan yang ada di Prigi merupakan beban pembangunan, akan tetapi kedepan merupakan aset pembangunan yang luar biasa jika dapat diperbaiki kualitasnya. Berdasarkan data lapangan, penduduk di pesisir Prigi yang besar itu akan tetap menjadi potensi dalam pemberdayaan masyarakat nelayan yang berbasis sosial ekonomi, sehingga penduduk yang besar dapat menjadi faktor pendorong pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi.

Kedua, sistem sosial budaya. Masyarakat nelayan di pesisir Prigi masih

mempunyai potensi yang dapat memanfaatkan dalam menghadapi masalah yang ada. Berdasarkan temuan lapangan, masyarakat nelayan di Prigi masih mempunyai solidaritas sosial yang masih tinggi dan masih berjalan dilingkungan mereka, kepemimpinan lokal sudah terbukti memberikan andil guna membangun masyarakat Prigi yang lebih baik di masa yang akan datang.

d. Faktor Pendukung Eksternal

Pertama, sumber daya alam. Pantai Prigi merupakan pantai yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi. Dengan potensi yang dimilikinya menjadikan Prigi sebagai salah satu tempat wisata yang indah serta potensi akan kekayaan laut yang dimilikinya. Dengan dijadikannya Prigi sebagai kota wisata, Prigi diharapkan mampu menjadi andalan perekonomian selain di bidang perikanan. Dengan adanya potensi alam yang melimpah dapat dijadikan modal dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. Potensi yang besar tidak akan habis dalam kehidupan masyarakat nelayan dalam memenuhi kebutuhan dan sekaligus dapat memutuskan hubungan dengan pedagang yang cenderung merugikan. *Kedua*, tersedianya sarana dan prasarana. Kawasan pesisir Prigi pada umumnya merupakan pusat kegiatan nelayan yang ada disekitarnya. Berdirinya pelabuhan serta prasarana yang lain seperti *cold storage*, pabrik tepung di wilayah tersebut banyak mengundang perhatian kegiatan sosial ekonomi dikawasan Prigi. Dengan dibangunnya sarana dan prasaran di prigi diharapkan dapat menunjang kehidupan para nelayan yang ada disekitar Prigi.

Ketiga, peran aktif masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat lokal mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. Partisipasi lokal merupakan wujud dari kepedulian masyarakat terhadap program yang dimiliki, karena masyarakat lokal lebih mengerti apa yang di inginkan. Dengan adanya partisipasi masyarakat lokal proses pemberdayaan akan semakin mudah karena

pelaksanaan program mengetahui apa yang menjadi kehendak masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Agus dkk. 2008. *Model Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Bantul* Ditinjau dari Perspektif Ekonomi dan Hukum. *Jurnal Fenomena*, 19:1-2.
- Agustnty, Harnita. 2009. Kemitraan Usaha Pada Masyarakat Pesisir. Diakses tanggal 30 Desember 2009 dari: <http://www.scribd.com>
- Anonymous. 2009. *Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Diakses tanggal 23 Agustus 2009 dari <http://id.teguh.web.id/negara-kesejahteraan-dan-pembangunan-kesejahteraan-sosial>.
- _____. 2009. *Kajian Kebijakan Kelautan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Direktorat Kelautan dan Perikanan
- _____. 2009. Pengertian Penelitian. Diakses tanggal tanggal 23 Agustus 2009 dari <http://acehforum.or.id/forum.php>
- _____. 2009. Kupas Tuntas Metode Penelitian Kualitatif. Diakses tanggal tanggal 23 Agustus 2009 dari : <http://massofa.wordpress.com/2008/01/14/kupas-tuntas-metode-penelitian-kualitatif-bag-1>
- Ardhana. 2008. *Penelitian Deskriptif*. Diakses tanggal 1 Desember 2009 dari : <http://ardana12.wordpress.com>
- Faiza, Riana. 2004. *Kajian Beberapa Aspek Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Nelayan Pengelola Muara Angke*. Institut Pertanian Bogor.
- Halim, Fakhruddin dkk. 2008. Nelayan Bangka Belitung. diakses tanggal 3 Oktober 2009 dari <http://id.wordpress.com/tag/metro-headline/>.
- Hatono, Tjahjo Tri dkk. 2006. Identifikasi Bentuk Kemiskinan Nelayan di Desa Eretan Wetan Melalui Kajian Sosial

- Budaya. *Jurnal Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Volume 1 Nomor 2*, 197-204.
- Hikmat, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung:Humaniora Utama Pres.
- Kusnadi. 2008. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara.
- Kusnadi. 2006. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora
- Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Ar-RuzzMedia.
- Lendryono, Fauzik. 2007. *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Malang:UMM Pres
- Manadiyanto, Sastrawijaya. 2002. *Nelayan Nusantara*. Jakarta: Badan Riset Kelautan dan Perikanan
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prasojo, Eko. 2003. *People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik*. FISIP UI
- Pical, Venda Jolanda. 2003. *Sistim Pembinaan Masyarakat Nelayan Dalam Perspektif Pembangunan Perikanan Yang Berkelanjutan Di Indonesia*. diakses tanggal 1 Desember 2009.
- Ramadan, La Ode Muhammad. 2009. *Kendala dan Tantangan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Diakses tanggal 1 November 2009 dari <http://kendariekspres.com/>.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi Good Governance)*. Bandung:PT. Refika Aditama.
- Siswanto, Budi. 2008. *Kemiskinan dan Perlawanan Kaum Nelayan*. Surabaya:Laksbang Mediatama
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bangong: PT Refika Aditama.
- Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung:Alfabeta
- Sulistiyono, Agung. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Berbasis Lokalitas (Studi Kasus Pengentasan Kemiskinan di Muara Angke Kelurahan Pluit Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara*. Fakultas Sosial dan Politik. Universitas Indonesia
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta:Gava Media
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2007. *Konseptualisasi Model Pemberdayaan LSM sebagai Fasilitator Pembangunan*. *Jurnal Kebijakan Administrasi Publik, Volume 11 Nomor 2*, 139-157.
- Tim BPS Kabupaten Trenggalek. 2014. *Kabupaten Trenggalek Dalam Angka*. Trenggalek:BPS Kabupaten Trenggalek
- Tim BPS Kecamatan Watulimo. 2014. *Kecamatan Watulimo dalam Angka*. Watulimo:Statistik Kecamatan Watulimo
- Tim Dinas Kelautan dan Perikanan. *Laporan Akhir Tahun 2012*. Trenggalek: Dinas Kelautan Dan Perikanan
- Tim Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. 2013. *Laporan Akhir Tahun 2013*. Prigi:PPN Prigi
- Tim UPTD TPI. 2013. *Selayang Pandang TPI Tahun 2013*. Prigi: UPTD TPI
- Wrihatnolo, R.Randy dan Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan (Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat)*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo